

PERAN WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE FOR PEACE AND FREEDOM DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN AFGHANISTAN

Muhammad Devasso Azzura Adam, Fani Agustina Nababan, Muhammad Yusuf Abror, Muchammad Yustian Yusa
Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

Women's discrimination is always happening in Afghanistan caused by the frequent conflict that occurred in Afghanistan and also poverty. This issue of discrimination also received attention from the international organization both government or non-government. One of the non-governmental international organizations that participated in this issue is Women International League for Peace and Freedom (WILPF). This research aims to analyse the role of WILPF related to women's empowerment in Afghanistan. This research uses qualitative methods and descriptive research to explain the role of WILPF to empower Afghan women. The concept of this research are international non-governmental organization (NGOs) and transnational feminism to explain the efforts to empower Afghan women by WILPF for peace mission. The finding of this research addresses the role of WILPF in Afghanistan to empower Afghan women who is through education, advocacy, empowerment of individuals, and monitoring agreement.

Keywords: *Afghan Women, Discrimination, Empowerment, Feminism, WILPF*

INTRODUCTIONS

Perempuan merupakan golongan yang rentan terkena pelanggaran HAM. Tak sedikit pula, masih ada pola pikir yang menempatkan perempuan menjadi manusia kelas dua akibat dari kelemahan fisik perempuan. Keadaan ini terus berlangsung didukung oleh keyakinan dan juga pola pikir tradisional yang masih melekat pada masyarakat. Beberapa negara pun masih menganut budaya patriarki yang menyebabkan semakin terhambatnya pergerakan perempuan. Perempuan yang kerap mendapat perlakuan buruk adalah hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Beberapa negara masih kurang dalam memperjuangkan keadilan perempuan di negaranya, sebagai contoh adalah Afghanistan. Perempuan di Afghanistan kerap mendapat perlakuan tidak adil. Salah satu isu penting dari hak asasi perempuan adalah penolakan terhadap ketidakseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki namun perempuan selalu lebih banyak mendapat ruang dalam pelanggaran HAM.

Afghanistan merupakan negara yang rentan akan konflik dan menjadi salah satu negara yang sering terjadi diskriminasi terhadap perempuan (George Arnett, 2014). Awal mula dari ketidakbebasan peran perempuan di Afghanistan, saat Uni Soviet mulai menginvasi Afghanistan dan mendukung kelompok Mujahidin. Setelah perginya Uni Soviet dari Afghanistan, kelompok Mujahidin kemudian tercatat melakukan pemerkosaan pada perempuan di Afghanistan. Tak sampai disitu, perebutan pemerintahan antara Taliban dan Mujahidin juga merupakan salah satu faktornya, di mana kelompok Taliban yang berkuasa memenangkan pemerintahan. Taliban merupakan kelompok pelajar beragama yang menginginkan penerapan syariah Islam di Afghanistan (Agustina, 2021).

Setelah Taliban berkuasa atas ibukota Afghanistan, yaitu Kabul pada tahun 1966, banyak peraturan ataupun larangan yang diberikan kepada perempuan di Afghanistan. Larangan-larangan yang ketat ini membatasi pergerakan perempuan. Dimulai dari hal kecil yang mana perempuan Afghanistan tidak diperkenankan mendengarkan musik, berfoto, bahkan melakukan kegiatan menghibur diri. Perempuan wajib memakai kerudung bahkan sering dipaksa memakai burqa. Tak sampai disitu, perempuan pun dilarang keluar tanpa ditemani oleh laki-laki mahramnya. Perempuan Afghanistan tidak diperbolehkan sekolah, bahkan dilarang melakukan pekerjaan domestik dan hanya melakukan pekerjaan rumah saja. Perempuan tidak dapat menentukan pilihan hidupnya seakan hidup dalam kurungan. Apabila ada yang melanggar dari peraturan tersebut, Taliban tak segan-segan akan menunjukkan kekuasaannya dengan membunuh, menyiksa, pembantaian secara brutal bahkan hingga melakukan tindakan pemerkosaan bagi perempuan Afghanistan. Tidak sedikit perempuan mengalami stres akibat pengurangan ini, kesakitan akibat dari penyiksaan dan pemerkosaan, bahkan sampai ikut mengakhiri hidupnya (Agustina, 2021).

Hal ini pun masih terus berlanjut sampai Taliban angkat kaki dari Afghanistan setelah intervensi dari Amerika Serikat terhadap Afghanistan (BBC, 2019). Walau, sudah menandatangani perjanjian Bonn Agreement, perjanjian sepakat bersama UN Security Council (2001) yang berupaya untuk menghentikan peperangan dan mendirikan pemerintahan sementara yang cukup adil dan peka terhadap perbedaan gender, tetapi masih saja terdapat pelanggaran HAM di Afghanistan. Hingga sampai kepemimpinan Taliban yang kedua pada tahun 2021, masih terjadi diskriminasi gender terhadap perempuan. Meski perempuan sudah boleh bersekolah tetapi tetap dibatasi pergerakannya. Lebih lanjut, mulai ditiadaknya menteri perempuan dalam pemerintahan Taliban (Sicca, 2021).

Ketidaksudahan konflik dan juga diskriminasi gender yang ada di Afghanistan berhasil menarik perhatian para feminisme lokal maupun internasional. Banyak perempuan Afghanistan mulai menyuarakan pendapatnya secara langsung ataupun mengirim surat ke organisasi internasional demi mengharapkan bantuan dan perhatian lebih banyak dari publik. Konflik sipil yang terus terjadi di Afghanistan menyulitkan perempuan Afghanistan dalam bertindak. Tak sedikit perempuan masih dikekang ataupun terisolasi akibat dari struktur sosial, budaya, dan agama yang melekat. Perempuan Afghanistan pun masih sering menderita dan tidak mendapat akses merata di setiap faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan. Ancaman keamanan dari pihak internal menjadikan perempuan Afghanistan mencari perlindungan kembali ke pihak eksternal negara.

Banyak Non-Government Organization yang bergerak dalam bidang feminisme mulai memberikan perhatiannya kepada perempuan Afghanistan. Para perempuan dunia mulai terpenggil dalam misi penyelamatan atas ketidakadilan. Tak ayal, banyak LSM memiliki program tersendiri dalam menyelamatkan ataupun memberdayakan perempuan yang terisolasi di negara sendiri. Salah satu organisasi non-pemerintah yang memberikan perhatiannya kepada isu ini adalah, Women's International League for Peace and Freedom (WILPF). WILPF merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam menyuarakan kesetaraan gender dunia. Tak hanya menyuarakan kesetaraan, WILPF pun memiliki program dalam memberdayakan perempuan dari penjuru dunia. Gerakan dari organisasi non-pemerintah ini menjadi nyata karena turut andil dalam mencari solusi atas isu yang terjadi. Organisasi non-pemerintah ini pun menyoroti isu di Afghanistan.

Melihat uraian di atas, timbul pertanyaan mengenai "Apa Peran Women's International League for Peace and Freedom dalam memberdayakan perempuan di Afghanistan?". Adapun konsep yang penulis pakai dalam menjabarkan peran yang akan dilakukan WILPF adalah LSM Internasional dan Feminisme Transnasional.

ANALYTICAL FRAMEWORK

Penelitian ini menggunakan konsep LSM Internasional dan konsep Feminisme Transnasional untuk menjelaskan upaya pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Kedua konsep tersebut saling berhubungan sebagai alat analisis penelitian. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat diartikan sebagai lembaga formal independen yang maksud utamanya adalah untuk mengakomodir tujuan bersama di tingkat nasional bahkan internasional (Martens, 2002, hal. 282). Ruang lingkup LSM tidak hanya berada pada tingkat lokal atau nasional, ruang gerak LSM mampu melampaui batas negara. LSM membuktikan bahwa hubungan internasional tidak hanya dilakukan oleh aktor-aktor negara, tetapi juga melibatkan aktor non-negara. Keterlibatan LSM dalam politik internasional didorong oleh perkembangan masyarakat dalam menanggapi isu-isu global. Perkembangan dan penyebaran informasi di masyarakat yang semakin mudah dijangkau dan tanpa batas dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat sehingga mendorong keterlibatan dalam kebijakan pemerintah (Anheier & Toepler, 2010, hal. 1037).

Kemampuan LSM berbeda dengan negara. LSM tidak memiliki wewenang, kekuatan, dan kedaulatan yang dapat disejajarkan dengan negara. LSM tidak dapat menggunakan kekuatan koersif seperti hak yang diberikan pada negara, tetapi memiliki beberapa kemampuan lain (Ahmed & Potter, 2006, hal. 15). Entitas tersebut dapat mempengaruhi politik internasional karena mereka menyalurkan kemampuannya melalui komunikasi. Ketika masyarakat, pemerintah, atau aktor non-negara lainnya saling melakukan komunikasi, akan menimbulkan suatu pemahaman bersama mengenai peran dan perilaku yang akhirnya menghasilkan peraturan mengenai perilaku dan hubungan tingkat lanjut (Ahmed & Potter, 2006).

Ahmed & Potter (2006) mengurai kekuatan (power) LSM menjadi Aksi dan Persuasi. Cara tersebut digunakan dalam mengatur kerangka sosial dan politik secara non-koersif. Aksi-aksi yang LSM lakukan di antaranya adalah membina masyarakat (educating the public), advokasi (advocacy), pemberdayaan masyarakat (people empowerment) melalui pengembangan ekonomi lokal dan pembentukan jaringan, serta memonitor perjanjian internasional (Ahmed & Potter, 2006). Pembinaan masyarakat dilakukan agar masyarakat lebih peka terhadap lingkungan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, serta agar mengetahui bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi suatu isu. Fungsi advokasi adalah sebagai perantara masyarakat dan pengambil kebijakan, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang kompeten, peduli atas isu, dan berkomitmen sehingga dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kegiatan pemberdayaan juga butuh dilakukan supaya masyarakat mampu menjadi percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya dan mampu untuk memperjuangkan hak kebebasan atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembentukan jaringan membantu LSM dan masyarakat untuk meluaskan pengaruhnya baik itu dari akumulasi pikiran, bantuan, dan dukungan sehingga upaya yang dilakukan efektif dan efisien. LSM internasional harus mengikuti perkembangan internasional dan isu-isu yang berada di

dalamnya. Negara-negara melakukan kesepakatan untuk menangani isu-isu tersebut. Dibutuhkan keterlibatan LSM internasional untuk mempengaruhi kesepakatan baik dari dialog bersama, mendesain rencana, dan mengkritik kebijakan sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari perjanjian internasional yang dibuat.

Konsep yang digunakan selanjutnya adalah konsep Feminisme Transnasional. Konsep Feminisme Transnasional berangkat dari pengertian feminisme yang didefinisikan sebagai keyakinan bahwa perempuan berhak mendapatkan hak, kuasa, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki serta mendapat perlakuan yang sama (Cambridge Dictionary, 2021). Feminisme Transnasional berarti gagasan solidaritas politik feminis di seluruh dunia yang melampaui kelas, ras, seksualitas dan batas-batas nasional (Mendoza, 2002, hal. 296). Keberadaan perempuan di seluruh dunia memiliki latar belakang dan keadaan yang berbeda-beda. Kerumitan mengenai feminisme juga diikuti perkembangan globalisasi dan dampak globalisasi tersebut kepada perempuan di seluruh dunia. Feminisme transnasional disebabkan oleh tendensi feminisme nasional untuk mempolitisasi isu-isu perempuan hingga melewati batas nasional.

Reilly (2011) menjelaskan bahwa hubungan interdependensi feminisme di seluruh dunia membentuk formulasi seperti *solidarity-building* dan *promoting emancipatory*. Solidaritas penting untuk menghasilkan daya tarik para feminis untuk saling terlibat dalam bergerak. *Solidarity-building* di antara individu feminis dan organisasi feminis akan saling berbagi pengetahuan mengenai dampak sistem kekuasaan yang opresif, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam membongkar dan membentuk kembali sistem tersebut (Alig, Neapole, Piccin, & Luna, 2021). Solidaritas feminis dibutuhkan untuk menciptakan keberagaman, kekuatan, dan kesatuan gerakan feminis untuk menghapus penindasan. Upaya tersebut bertujuan untuk membongkar segala bentuk penindasan dengan kolaboratif dan usaha kolektif. Sedangkan *promoting emancipatory* mendorong feminis agar terbebas dari distorsi yang menghambat kapasitas pengembangan diri mereka. Dukungan terhadap emansipatoris dan solidaritas interseksional akan membantu mempertimbangkan kembali mengenai hak asasi universal.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan memanfaatkan desain penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap apa yang menjadi objek penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa data sekunder seperti jurnal, buku, dokumen-dokumen, berita, laporan, dan infografis yang relevan dengan penelitian ini. Desain penelitian ini adalah deskriptif sehingga data-data yang diakumulasi dan dianalisis menghasilkan data penelitian berupa tulisan.

RESULT AND DISCUSSION

Afghanistan terdiri dari ragam suku, bahasa, dialek, dan sifat tertentu. Salah satu etnis besar di Afghanistan bernama Pashtun, terkenal dengan keketannya dalam membagi peran gender dan mengisolasi gerak perempuan di rumah (Wahab & Youngerman, 2007). Etnis Pashtun mengenal kode kehormatan yang disebut *Pashtunwali*, yang berisi prinsip mengenai keramahan dan suka pada tamu yang membutuhkan bantuan, keadilan dan pembalasan atas kesalahan, konsep mempertahankan “Zan, Zar, dan Zamen” (wanita/keluarga, harta, dan tanah milik) (Wahab & Youngerman, 2007).

Afghanistan menjadi negara yang bias gender, sehingga banyak gerakan protes perempuan yang tumbuh subur di negaranya selama berabad-abad. Sebelumnya, wanita menjadi bagian dari Afghanistan, namun sejarah mengenai kontribusi perempuan jarang tercatat dalam buku sejarah Afghanistan (Jalal & Silva, 2014). Tercatat seorang perempuan yang terkenal perannya dalam peperangan Anglo-Afghan, bernama Malalai, berasal dari desa Khig. Pahlawan wanita Afghanistan tersebut terlibat dalam Pertempuran Maiwand pada tahun 1880 dan, walaupun terbunuh, mampu mendorong semangat pasukan Afghanistan hingga menguasai peperangan.

Selama tahun 1880 hingga 1901, pemerintahan dipegang oleh Abdur Rakhman Khan yang dijuluki sebagai "The Iron Amir". Masa itu membawa perubahan terhadap hubungan sosial perempuan. Abdur Rakhman Khan mengenalkan beberapa amandemen terhadap hukum adat tertentu, khususnya yang mengatur tentang perkawinan. Perempuan juga diberi hak pewarisan dan hak menceraikan dalam kondisi tertentu. Setelah kematian Abdur Rakhman Khan, pemerintahannya diturunkan kepada anaknya, Amir Habibullah Khan, dan memerintah selama delapan tahun (Jalal & Silva, 2014). Amir Habibullah Khan mengembalikan seorang penyair bernama Mahmud Beg Tarzi yang diasingkan pada tahun 1882-1902 (Khan & Afridi, 1967). Tarzi yang merupakan seorang cendekiawan dan nasionalis (mengadopsi prinsip perubahan dari gerakan "Young Turk", yakni gerakan yang dilakukan orang-orang Turki dan cenderung menganut filsafat Barat) pada saat itu mendukung pendidikan dan perbedaan politik. Tarzi berkeyakinan bahwa perempuan adalah anugerah bagi masyarakat dan bahwa agama Islam tidak pernah merampas kesamaan hak yang ada pada perempuan. Penghormatan terhadap hak-hak perempuan semakin disorot akibat keberadaan Tarzi yang mendukung gerakan feminis.

Pengaruh Tarzi dalam pendidikan dan penghormatan hak perempuan mendorong pemimpin Afghanistan selanjutnya, Amanullah (1919-1929), untuk meneruskan penerapan kemajuan tersebut. Amanullah mengangkat derajat perempuan di keluarga dan masyarakat. Dibantu oleh istrinya, Soraya Tarzi, untuk mendorong kebebasan dan hak-hak perempuan hingga beberapa perempuan berpartisipasi dalam rapat pemerintah. Amanullah mengecam hukum adat yang membatasi atau memaksakan kehendak bebas perempuan. Begitu pula organisasi perlindungan perempuan saat itu bernama Anjuman-e-Himayat-e-Niswan mendorong perempuan Afghanistan untuk menyatakan keluhan-keluhan dan berjuang melawan ketidakadilan terhadap perempuan. Gagasan Amanullah dan Soraya mendapat penolakan dari kaum konservatif Afghanistan yang menilai bahwa gagasan yang dibawanya terlalu Barat dan bertentangan dengan Islam (Jalal & Silva, 2014). Gejolak yang terjadi antara Amanullah dan kaum konservatif menjatuhkan kekuasaan Amanullah. Kaum konservatif memprotes penuh segala bentuk kebarat-baratan yang dibawa Amanullah sehingga atas protes tersebut, segala bentuk kebebasan hak perempuan menjadi sebaliknya.

Berakhirnya pemerintahan Amanullah, Afghanistan dipimpin oleh Nadir Shah. Reformasi yang dibuat oleh Amanullah banyak yang dibatalkan oleh Nadir Shah. Kebijakannya menghormati para pemimpin suku dan agama, sehingga tidak memungkinkan perempuan untuk bergerak bebas seperti ketika di bawah pimpinan Amanullah. Kemudian Nadir Shah dibunuh pada tahun 1933 oleh seorang mahasiswa muda bernama Abdul Khaliq akibat perseteruan lama antara keluarga Musahiban dan Charki (Wahab & Youngerman, 2007).

Kepemimpinan selanjutnya berada di bawah Zahir Shah, yang merupakan raja terakhir Afghanistan. Zahir Shah memerintah selama empat dekade (1933-1973) mencoba menyatukan dan memodernisasi negara setelah periode pemberontakan terhadap Amanullah. Perempuan dikirim ke luar negeri untuk pendidikan dan kecerdasannya dihormati untuk berkontribusi kepada masyarakat (Mehta, 2002). Kemajuan terhadap

penghormatan hak-hak wanita ditunjukkan kembali pada masa ini. Ditandai dengan berdirinya sekolah menengah pertama perempuan di Kabul pada tahun 1941. Pendidikan perempuan difokuskan serta mulai memasuki dunia kerja, menjadi perawat, politisi, dokter, dan guru (Jalal & Silva, 2014). Berdiri pula Democratic Organization of Afghan Women (DOAW) pada tahun 1965, bertujuan untuk meluncurkan kampanye-kampanye melawan feodalisme, menolak pernikahan paksa dan penetapan mahar pengantin, serta berjuang melawan buta huruf (Moghadam, 1993).

Pada tahun 1973-1978, Muhammad Daoud Khan memimpin Afghanistan. Pertama dalam sejarah Afghanistan untuk menghapus monarki secara resmi dan menggantinya dengan republik. Wanita di perkotaan mendapat banyak hak dan kebebasan personal pada masanya. Berbeda dengan perempuan yang tinggal di pedesaan, mereka berpikiran sempit dan terbelakang, serta terjadi eksploitasi, ditindas, dan diperlakukan tidak layak (Jalal & Silva, 2014). Daoud dibunuh oleh PDPA (People's Democratic Party of Afghanistan) melalui kudeta pro-komunis dan Taraki menjadi pemimpin selanjutnya (Esther Fleming, 2020). Taraki melanjutkan perjuangan memajukan dan promosi hak-hak penuh perempuan.

Pengaruh Uni Soviet sudah lama berada di Afghanistan. Pada saat invasi Uni Soviet terhadap Afghanistan terjadi (1979), banyak warga Afghanistan termasuk perempuan dan anak-anak terbunuh. Namun pada saat yang bersamaan, akses kebebasan juga diberikan seperti izin bekerja di universitas, maskapai penerbangan, serta perusahaan swasta (Jalal & Silva, 2014). Kaum tradisional kemudian menuduh reformasi yang dilakukan PDPA tidak beralasan dan mengganggu kehidupan mereka. Terjadi pembunuhan reformis PDPA dan perempuan berpakaian kebaratan di Afghanistan. Hak-hak perempuan menjadi sempit di dalam kerangka komunis. Terjadi demonstrasi besar-besaran menolak pendudukan Rusia yang diorganisir oleh perempuan Afghanistan bernama Nahid yang akhirnya terbunuh dan menjadi simbol patriotisme. Pendudukan Soviet mendapat perlawanan dan penolakan dari para mujahidin yang membela Afghanistan. Pada tahun 1989 pendudukan Soviet berakhir dan Afghanistan rentan terjadi perang sipil. Kaum mujahidin mengambil kendali kuasa yang sebelumnya dikuasai komunis. Mujahidin memberlakukan hukum dan aturan berdasarkan agama Islam. Mereka menempatkan posisi laki-laki jauh di atas dibanding perempuan. Penguasaannya diikuti oleh pembakaran universitas, sekolah, dan perpustakaan.

Gerakan Mujahidin mendorong pembentukan Taliban (dalam bahasa pashto berarti "pencari ilmu"). Taliban mendominasi ibukota Kabul dan menerapkan aturan yang ketat bagi kaum perempuan. Pembatasan dilakukan secara ketat, perempuan dilarang menampilkan diri di hadapan umum. Perempuan tidak boleh bersuara keras, harus mengenakan kerudung, tidak boleh muncul di balkon rumah atau apartemen, gambar wanita tidak boleh terbit di media, tidak dapat mengunjungi dokter yang berbeda jenis kelamin, dan tidak boleh sekolah (Jalal & Silva, 2014). Perempuan yang berprofesi sebagai dosen dan dokter beralih menjadi pengemis dan pelacur untuk menghidupi kehidupan keluarganya. Kontrol Taliban sejak 1996 diakhiri oleh Amerika Serikat pada 2001 yang menuduhnya terlibat dalam kejadian 11 September 2001. Pembatasan yang dilakukan sebelumnya oleh Taliban resmi dicabut dan memperbolehkan perempuan sekolah kembali.

Pada tahun 2004, Afghanistan melakukan pemilihan presiden pertama kalinya. Dari pemilihan presiden ini, Hamid Karzai keluar sebagai pemenang, dan pertama kalinya dalam tiga puluh tahun lamanya, Afghanistan memilih parlemennya. Hal ini menjadi tonggak perubahan kebijakan publik yang berdampak pada perubahan kebijakan perempuan di Afghanistan. Terpilihnya presiden dan parlemen merupakan bukti bahwa Afghanistan telah memasuki babak demokrasi, selain itu pemerintahan Hamid Karzai mengadopsi undang-undang baru untuk melanjutkan hak-hak perempuan. Ketentuan ini diambil dari Bonn Agreement yang sempat disepakati di masa pemerintahan transisi. Undang-undang

ini pun tidak lepas dengan hukum Islam. Penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan pendirian penampungan perempuan yang terkena kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindakan pemerintah yang cukup responsif terhadap isu perempuan di Afghanistan.

Hamid Karzai juga menempatkan perempuan dalam jabatan pemerintah, seperti menjadi menteri di Kementerian Urusan Perempuan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kontra-Narkotika, dan Kementerian Tenaga Kerja, Sosial, Martir, dan Penyandang Cacat serta Komisi Independen Hak Asasi Manusia Afghanistan. Tak hanya itu, perempuan Afghanistan juga menjadi duta besar untuk Norwegia, Swiss, dan Indonesia. Ada pula yang menjadi wakil menteri salah satunya di kementerian ekonomi (Haidari, 2016).

Hal ini pun berlanjut sampai ke tahun 2009, yang mana Hamid Karzai kembali terpilih menjadi presiden Afghanistan. Hamid Karzai membuat keputusan dengan memperkuat perlindungan terhadap berbagai macam pelanggaran yang terjadi pada hak asasi perempuan. Pemerksaan, pernikahan di bawah umur, dan hak penolakan pewarisan merupakan penambahan peraturan hak-hak perempuan di Afghanistan. Masyarakat internasional mulai kagum dengan peningkatan hak-hak perempuan di Afghanistan. Namun sayangnya hal ini hanya sementara. Banyak peraturan kemudian mulai terkikis akibat dari munculnya perang sipil maupun penarikan bantuan dari luar negeri. Kemajuan yang dicapai selama ini pun mulai memudar. Perempuan yang selama ini bekerja di institusi pekerjaan, pendidikan, ataupun di aspek kehidupan lainnya mulai mendapat ancaman, pelecehan, serangan fisik, hingga pembunuhan. Hal ini, menjadikan perempuan Afghanistan mulai terpuruk kembali. Perempuan Afghanistan juga masih menghadapi keterpurukan dalam pendidikan, dan kemiskinan pun semakin menjadi di negara Afghanistan akibat konflik. Tingkat harapan ibu pun semakin menurun (Powell, 2014).

Setelah itu pada pemilihan presiden di tahun 2014, terjadi pemberontakan oleh Taliban yang menyebabkan terjadi dua kali putaran pemilihan presiden, diakhiri dengan Ashraf Ghani menjadi presiden dan Abdullah Abdullah menjadi dewan tinggi pemerintah untuk rekonsiliasi nasional. Kedudukan Ashraf Ghani membuat hak perempuan mulai meningkat lagi setelah menurun akibat dari konflik yang terjadi pada masa kedudukan Hamid Karzai periode kedua. Afghanistan selalu akan memperjuangkan hak asasi perempuan bagi perempuan Afghanistan. Peningkatan hak asasi perempuan pun terus terlihat jelas. Peningkatan di sektor pendidikan pun semakin membuat Afghanistan percaya akan mampu mengejar ketertinggalan mereka. Sampai pada 2016 kemarin, Afghanistan mendapat peningkatan karena rekor jumlah perempuan yang ikut serta belajar di sekolah sudah ada lebih dari 2,5 juta daripada 8 juta siswa yang terdaftar di sekolah (WES, 2016). Tak hanya itu, tercatat pada tahun 2016 pun sudah banyak ibu hamil yang mulai mendapat fasilitas kesehatan.

Pemerintahan Ashraf Ghani juga bekerja lebih keras dalam mengubah pola pikir masyarakat Afghanistan. Pola pikir masyarakat yang masih tradisional ini juga menjadi salah satu penghambat dari kemajuan perempuan. Selain kebijakan pemerintah Afghanistan juga menjadi agen perubahan sosial untuk memperbaiki pola pikir masyarakat Afghanistan ini. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan para tokoh ulama dan tokoh masyarakat, agar para tokoh ini ikut serta dalam mengubah pola pikir masyarakat. Pemerintah pun mengeluarkan program *national solidarity*, yang mana program ini merupakan penggabungan antara perempuan Afghanistan dengan laki-laki untuk menilai kebutuhan lokal, mengatur hibah dan mengerjakan pembangunan untuk daerah masing-masing. Di program ini, terlihat lebih banyak perempuan yang ikut serta menjadikan bukti penurunan diskriminasi perempuan (Haidari, 2016).

Ashraf Ghani pun berjanji akan terus mengikut sertakan perempuan dalam pemerintahannya. Namun, kembali perempuan Afghanistan harus menelan pil pahit. Pada 2021 kemarin terjadi kembali bentrokan di Afghanistan yang diakibatkan oleh Taliban. Taliban kemudian mulai menguasai pemerintahan Afghanistan, didukung oleh pelarian dari Ashraf Ghani dari Afghanistan. Kembalinya pemerintahan Taliban maka dapat dipastikan akan ada peningkatan diskriminasi perempuan. Perempuan Afghanistan kembali dikekang. Pemakaian burqa yang wajib, musik yang masih ilegal, bahkan pengawalan pekerja perempuan ke tempat kerja mereka merupakan beberapa aturan dari pemerintahan Taliban yang baru (Suci Sekarwati, 2021). Selain itu, parahnya pemerintah Taliban menutup Kementerian Urusan Perempuan (Sicca, 2021).

Perjalanan panjang perjuangan kaum perempuan Afghanistan dalam memperoleh hak-haknya mendapat tantangan baik dari sisi tradisi kesukuan, pemahaman agama, politik, dan sosio-ekonomi. Kaum perempuan selama ini diperlakukan sangat timpang dan berbeda jauh dari perlakuan yang diterima oleh laki-laki. Sejarah Afghanistan modern menunjukkan perjuangan atas hak perempuan yang sangat kompleks dan menimbulkan perhatian dari pihak internasional, terutama dari organisasi perempuan transnasional. Maka dari itu, diperlukan bantuan kembali dari organisasi non-pemerintah dalam memberdayakan perempuan Afghanistan yang sempat terkekang oleh pola pikir tradisional.

Peran organisasi internasional cukup penting dalam menyelesaikan isu penting yang ada di berbagai negara dunia. Ketika masyarakat tidak cukup diperhatikan atau tersingkirkan oleh negaranya sendiri, maka disinilah masyarakat dapat meminta bantuan kepada organisasi internasional baik yang pemerintah atau non-pemerintah. Salah satu organisasi non-pemerintah internasional adalah Women International League for Peace and Freedom (WILPF). Organisasi non-pemerintahan lingkup Internasional ini didirikan pada tahun 1915, dan memulai melakukan visinya pada 1919 telah ikut mengeluarkan opininya terhadap Perjanjian Versailles, kemudian sampai tahun 1920an ikut serta mempromosikan cara arbitrase internasional dan mekanisme mediasi dalam kasus perselisihan antar negara (WILPF, 2021). Melihat diskriminasi perempuan yang terjadi di Afghanistan, menjadikan WILPF mendirikan WILPF Afghanistan pada tahun 2015 dengan tujuan mempromosikan program pembangunan perkembangan serta mengembangkan partisipasi aktif perempuan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Tak hanya itu WILPF Afghanistan juga memiliki komitmen untuk bekerja dengan masyarakat Afghanistan untuk mencegah kekerasan berbasis gender dan memberikan edukasi untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan warga Afghanistan (WILPF, 2018).

Pada tahun 1983, WILPF mengadakan kongres ke 22 untuk Afghanistan dengan tema Women Save the World. Walau adanya WILPF Afghanistan pada tahun 2015, namun isu Afghanistan ini sudah lama sekali diperhatikan oleh WILPF. Pada kongres ke 22 mengangkat tema Women Save the World: Twenty-Second International Congress of the Women's International League for Peace and Freedom untuk Afghanistan. WILPF pada tahun 1983 memberikan pernyataan yang ditujukan kepada seluruh negara untuk menjual persenjataan yang mengarah pada peperangan. Kongres yang dilaksanakan di Gothenburg tersebut berada di tengah perlombaan senjata antara Blok Barat dan Blok Timur pada masa Perang Dingin. Afghanistan menjadi salah satu negara yang disorot dalam dokumen resolusi WILPF, meyakinkan kuat bahwa segala konflik harus diselesaikan oleh cara-cara yang tidak mengarah pada kekerasan. Sektor gerakan feminis nasional harus mendesak pemerintah supaya mendukung tujuan-tujuan negosiasi yang berada di bawah bantuan PBB untuk mengamankan hak rakyat Afghanistan untuk memutuskan masa depannya sendiri (WILPF, 2012). WILPF Afghanistan sendiri mengerjakan perannya dibantu oleh peran laki-laki juga, sehingga terjadi keseimbangan peran di WILPF Afghanistan ini. WILPF

Afghanistan secara langsung turun tangan dalam menangani isu di perempuan di Afghanistan.

Berdasarkan seluruh data dan pemaparan dalam variabel impact, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok telah menunjukkan keberhasilan kepatuhannya terhadap rezim Paris Agreement. Dengan bukti bahwa Tiongkok telah berhasil mengalami penurunan dalam pengeluaran emisi karbonnya di beberapa tahun pasca ratifikasi. Compliance ini merupakan tingkat kepatuhan Tiongkok dalam periode awal yakni 2015-2020 yang dapat digunakan sebagai prediksi awal yang bagus untuk melihat tingkat optimisme dan keseriusan Tiongkok dalam menyelesaikan compliance terhadap Paris Agreement di tahun 2030.

Peran edukasi untuk masyarakat

Pembatasan akses pendidikan di Afghanistan telah mempersempit pandangan kaum perempuan mengenai hak mereka sendiri. Pendidikan yang layak dibutuhkan agar kaum perempuan mampu mendapat haknya tanpa diskriminasi. Melalui pendidikan, mereka dapat aktif berkontribusi di masyarakat dan berkualifikasi tinggi pada sektor-sektor penting negara. Sepanjang sejarah Afghanistan, hak kebebasan akses pendidikan bagi perempuan adalah hal tabu. Terjadi ketimpangan antara di desa dan perkotaan. Masih banyak didapati kekerasan seksual, diskriminasi, eksploitasi, dan ketimpangan gaji karena kesulitan mereka terhadap akses pendidikan. Penghapusan literatur-literatur penting dan bersejarah membuat banyak rakyat Afghanistan kehilangan akses edukasi.

Secara etimologi, edukasi berarti proses pengembangan diri. Menurut KBBI, edukasi atau pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (KBBI, 2021). Melihat arti dari kata pendidikan, dapat dipahami pentingnya pendidikan dalam mengubah pola pikir suatu kelompok orang. WILPF internasional mulai melihat bahwa bidang pendidikan sebagai bagian krusial dari gerakannya pasca Perang Dunia II (WILPF, 2021). WILPF Afghanistan juga hadir untuk memberikan edukasi atau pendidikan kepada masyarakat Afghanistan.

Dalam mengedukasi masyarakat Afghanistan, WILPF Afghanistan secara aktif mempromosikan dan mendukung upaya yang dipimpin perempuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di Afghanistan dan sumber daya ekonomi Afghanistan yang terbatas akibat dari konflik ini. WILPF Afghanistan dalam melaksanakan program yang dibentuk mengunggulkan perempuan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut menjadi edukasi pada masyarakat Afghanistan bahwa perempuan layak dalam memimpin suatu kebijakan. Tindakan WILPF Afghanistan ini merupakan salah satu edukasi dalam mengubah pola pikir masyarakat Afghanistan yang memiliki pola pikir tradisional dan menganggap rendah perempuan.

Program: Education from TV and Media Activity

Salah satu peran edukasi yang dilakukan oleh WILPF Afghanistan adalah dengan tampil di media televisi untuk menyuarakan peran perempuan agar aktif dalam aksi perdamaian dan keamanan. Edukasi ini disiarkan dan dilihat secara nasional dengan 300.000 penonton pada Desember 2019. Secara tidak langsung, WILPF Afghanistan telah mengedukasi masyarakat Afghanistan mengenai peran perempuan yang cukup mumpuni dalam berbagai hal salah satunya menciptakan perdamaian dan keamanan di Afghanistan (WILPF Afghanistan Section, 2019).

Peran Pemberdayaan

Diperolehnya pendidikan yang layak akan mendorong masyarakat untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi sekitar. Pembangunan manusia memanfaatkan potensi dasar yang dimilikinya agar dapat mandiri, mampu beradaptasi, dan bebas menentukan

pilihan. Diperolehnya pendidikan yang layak akan mendorong masyarakat untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi sekitar. Pembangunan manusia memanfaatkan potensi dasar yang dimilikinya agar dapat mandiri, mampu beradaptasi, dan bebas menentukan pilihan.

Program: Capacity-Building Training for Grass-root Provincial Women Leaders

Implementasi pemberdayaan masyarakat telah diselenggarakan oleh AWPFO (Afghan Women Peace and Freedom Organization) untuk Afghanistan melalui program Capacity-Building Training for Grass-root Provincial Women Leaders. Program tersebut adalah program peningkatan kapasitas yang mengajak 14 perwakilan provinsi di Afghanistan untuk mengikuti program pelatihan di Kabul pada tahun 2019 (WILPF Afghanistan Section, 2021). Agenda yang diselenggarakan menarik minat partisipasi perempuan Afghanistan dalam jumlah besar, namun keterbatasan keuangan membatasi kuota pesertanya.

Program pelatihan membagi beberapa peserta ke dalam beberapa grup dengan topik pelatihan yang berbeda. Topik pelatihan tersebut di antaranya adalah administrasi dan manajemen, manajemen keuangan, litigasi, board management, komunikasi internal dan eksternal, serta keuangan dan sumber daya manusia. Peserta yang mengikuti pelatihan dan telah memilih topiknya masing-masing akan diberikan pengetahuan dasar dan penugasan. Topik-topik tersebut dihadirkan agar para perempuan mampu bersikap profesional dalam memimpin dan mengelola sesuatu. Mereka diharapkan paham bagaimana menghadapi suatu persoalan dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan (WILPF Afghanistan Section, 2021). Program ini menanamkan pemahaman bahwa kepemimpinan adalah keterampilan yang dimiliki oleh siapa pun.

Narasumber program pemberdayaan juga memberikan pengetahuan tentang keamanan dan manajemen resiko. Pengetahuan tentang keamanan memberikan manfaat terhadap perempuan Afghanistan mengingat kondisinya belum mapan sepenuhnya dan Afghanistan masih menjadi negara yang catatan buruknya mengenai perempuan membekas hingga sekarang. Program ini sebagai pencerminan unsur feminisme transnasional yakni sebagai pemberdaya masyarakat untuk pengembangan ekonomi lokal ditambah pembentukan jaringan melalui perwakilan dari berbagai provinsi serta akses ke duta besar luar negeri.

Konferensi: Role and Participation of Women in Sustainable Peace from Islamic Perspective

Konferensi ini dihadirkan oleh perempuan dan pemuda Afghanistan agar lebih sadar dengan keadaan sekitar. Inti dari konferensi ini adalah meningkatkan kesadaran akan perdamaian. Konferensi diikuti oleh 184 peserta laki-laki dan perempuan dari berbagai lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk saling mengetahui peran masing-masing dalam menjaga perdamaian berkelanjutan dan isu-isu perdamaian. Promosi terhadap partisipasi perempuan dalam setiap isu perdamaian juga dipromosikan sebagai bentuk kesetaraan (WILPF Afghanistan Section, 2019).

Peran Monitoring

Kegiatan monitoring atau pengawasan merupakan salah satu kegiatan LSM Internasional dalam memberdayakan suatu kelompok. Fungsi pengawasan ini adalah melihat sudah sejauh manakah keberhasilan dari isu yang diperjuangkan. Pengawasan juga dilakukan untuk mengawasi setiap perjanjian yang telah diberikan oleh pembuat kebijakan. Maka dari itu penting bagi LSM Internasional untuk selalu mengikuti perkembangan isu yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh LSM Internasional merupakan evaluasi dari program

sebelumnya untuk menentukan program berikutnya. Hal ini tidak berbeda dengan WILPF Afghanistan yang turut memiliki fungsi pengawasan. WILPF Afghanistan melakukan fungsi pengawasannya dengan mengeluarkan pernyataan pers mengenai pernyataan mereka terhadap hasil kebijakan serta mengadakan pertemuan dewan internal WILPF Afghanistan untuk evaluasinya.

Pernyataan Pers Terkait Delegasi KTT Moskow 19 Maret 2021

Adapun kegiatan pengawasan WILPF Afghanistan adalah mengawasi hasil kebijakan pemerintah Afghanistan mengenai hak dan peran perempuan. Salah satu pernyataan pers yang dilayangkan oleh WILPF Afghanistan kepada Pemerintah Afghanistan saat melihat delegasi untuk KTT Moskow kedua pada tanggal 19 Maret 2021. Perwakilan dari Afghanistan hanya mengirimkan satu perempuan dari lima belas perwakilan untuk menjadi delegasi pada konferensi tersebut (Putz, 2021). Menyikapi hal ini WILPF Afghanistan mengeluarkan surat pernyataan bahwa hal ini tidak adil karena perempuan mempunyai peran penting dalam mengatasi perdamaian dan keamanan. Tak hanya itu, konferensi ini juga membahas mengenai isu perempuan Afghanistan tetapi hanya menghadirkan satu perwakilan dari perempuan Afghanistan. Sikap WILPF dalam mengeluarkan pernyataan adalah bukti bahwa pengawasan terhadap kesepakatan internasional penting dilakukan. Tindakan ini tentunya menjadi perwujudan dari promosi kesetaraan dan keberpihakan.

CONCLUSION

Perjuangan perempuan dan konflik yang berkepanjangan di Afghanistan memicu perhatian feminisme transnasional. Solidaritas feminisme dunia berupaya memberikan bantuan baik advokasi, finansial, kampanye, dan pemberdayaan bagi masyarakat di Afghanistan. WILPF adalah salah satu organisasi yang berdampak langsung terhadap gerakan feminis di Afghanistan. WILPF juga menempatkan sektor-sektornya di beberapa negara, terutama Afghanistan. Perhatian WILPF akan keadaan dan nasib perempuan di Afghanistan mendorongnya untuk terlibat langsung dengan masyarakatnya. Upaya mengatasi ketimpangan dilakukan melalui program-program konstruktif yang berdampak bagi masyarakat Afghanistan. Perempuan Afghanistan membutuhkan adanya keberpihakan terhadap mereka agar potensi penggunaan hak mereka terjaga. Peran WILPF di antaranya berkaitan dengan pendidikan, advokasi, pemberdayaan, dan monitor kesepakatan internasional.

Peningkatan solidaritas feminisme transnasional butuh dilakukan secara terus-menerus agar tujuan anti diskriminasi dan marginalisasi perempuan dapat tercapai. Perjuangan perempuan dalam meraih hak-haknya memerlukan keberpihakan. Masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani kasus perempuan. Solidaritas feminis interseksional menunjukkan sikap kooperatif demi pemberdayaan perempuan untuk menentukan pilihannya sendiri.

Peran yang dilakoni oleh WILPF untuk perempuan Afghanistan banyak membuahkan hasil. Langkah WILPF mendirikan kantor seksi di Afghanistan agar lebih terlibat dengan masyarakat Afghanistan dan dapat memberdayakan masyarakat Afghanistan secara langsung. Masifnya edukasi yang disebar oleh WILPF Afghanistan kepada masyarakat semakin menyadarkan masyarakat Afghanistan terhadap peran perempuan dalam perdamaian cukup penting. Melalui WILPF Afghanistan banyak perempuan ataupun laki-laki mulai menyuarakan pendapatnya mengenai hak dan peran perempuan. Program-program yang dilakukan oleh WILPF Afghanistan menambah peningkatan pengaruh perempuan Afghanistan terhadap kehidupan.

REFERENCE

- Agustina, H. N. (2021). *PEREMPUAN AFGHANISTAN REPRESI DAN RESISTENSI* (First; W. Kurniawan, Ed.). Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Ahmed, S., & Potter, D. M. (2006). *NGOs in International Politics*. Bloomfield: Kumarian.
- Alig, M., Neapole, J., Piccin, K., & Luna. (2021). *A Guide to Building Feminist Intersectional Solidarity*. Ottawa.
- Anheier, H. K., & Toepler, S. (2010). International Encyclopedia of Civil Society. In *International Encyclopedia of Civil Society*. New York: Springer-Verlag.
<https://doi.org/10.1007/978-0-387-93996-4>
- BBC. (2019, September 9). Afghanistan profile - Timeline -. Diambil 27 September 2021, dari <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253>
- Cambridge Dictionary. (2021, September 20). FEMINISM | meaning in the Cambridge English Dictionary. Diambil 23 September 2021, dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feminism>
- Esther Fleming. (2020, Mei 29). When was Daoud assassinated? – Sidmartinbio.org. Diambil 26 September 2021, dari sidmartinbio.org website: <https://www.sidmartinbio.org/when-was-daoud-assassinated/>
- George Arnett. (2014, Juni 18). Global peace index 2014: every country ranked. Diambil 27 September 2021, dari The Guardian website: <https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/jun/18/global-peace-index-2014-every-country-ranked>
- Haidari, M. A. (2016). Institutionalizing Women's Rights for Afghanistan's Future – The Diplomat. *The Diplomat*. Diambil dari <https://thediplomat.com/2016/03/institutionalizing-womens-rights-for-afghanistans-future/>

- Jalal, M., & Silva, M. (2014). *Hanging by A Thread: Afghan Women's Rights and Security Threats*. Quebec: Callawind book Publishing.
- KBBI. (2021). Arti kata didik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diambil 27 September 2021, dari kbbi.web.id website: <https://kbbi.web.id/didik>
- Khan, S., & Afridi, S. (1967). *WORKS OF MAHMUD BEG TARZI , THE PRECURSOR OF REFORM*. (62), 127–150.
- Martens, K. (2002). Mission impossible? Defining nongovernmental organizations. *Voluntas*, 13(3), 271–285. <https://doi.org/10.1023/A:1020341526691>
- Mehta, S. (2002). *Women for Afghan Women Shattering Myths and Claiming The Future*. New York: Palgrave Macmillan.
- Mendoza, B. (2002). Transnational feminisms in question. *Feminist Theory*, 3, 295–314. Diambil dari <https://doi.org/10.1177%2F146470002762492015>
- Moghadam, V. M. (1993). *Modernizing Women Gender and Social Change in the Middle East (Women and Change in the Developing World)*. Colorado: Lynne Rienner.
- Powell, C. (2014). *Women and Girls in the Afghanistan Transition*. New York: Council on Foreign Relations. Diambil dari www.cfr.org.
- Putz, C. (2021). Afghan Delegation for Moscow Talks Announced – The Diplomat. *The Diplomat*. Diambil dari <https://thediplomat.com/2021/03/afghan-delegation-for-moscow-talks-announced/>
- Reilly, N. (2011). Doing transnational feminism, transforming human rights: The emancipatory possibilities revisited. *Irish Journal of Sociology*, 19(2), 60–76. <https://doi.org/10.7227/IJS.19.2.5>
- Sicca, S. P. (2021, September 18). Taliban Tutup Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan dan Aktifkan Polisi Moral Halaman all - Kompas.com. Diambil 27 September 2021, dari Kompas.com website: <https://www.kompas.com/global/read/2021/09/18/105545770/taliban-tutup-kementerian-urusan-perempuan-afghanistan-dan-aktifkan?page=all>

- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*, Muhammad Ali Sodik (1 ed.). Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metode+analisis+data+ebook+pdf&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiO2uSVztLsAhVT9XMBHcoCAdcQ6AEwBHoECAIQAg#v=onepage&q&f=false>
- Suci Sekarwati. (2021). 13 Aturan Taliban untuk Perempuan -. Diambil dari Tempo.co website: <https://fokus.tempo.co/read/1503425/13-aturan-taliban-untuk-perempuan>
- UN Security Council. *AGREEMENT ON PROVISIONAL ARRANGEMENTS IN AFGHANISTAN PENDING THE RE-ESTABLISHMENT OF PERMANENT GOVERNMENT INSTITUTIONS.*, (2001). peacemaker.un.org.
- Wahab, S., & Youngerman, B. (2007). *A Brief History of Afghanistan*. New York: Facts on File.
- WES. (2016, September 6). Education in Afghanistan. Diambil 27 September 2021, dari wenr.wes.org website: <https://wenr.wes.org/2016/09/education-afghanistan>
- WILPF. (2012). WILPF RESOLUTIONS. *WILPF Resolutions 22nd Congress Gothenburg, Sweden 1983*. wilpf.org. Diambil dari https://wilpf.org/wp-content/uploads/2012/09/WILPF_triennial_congress_1983.pdf
- WILPF. (2018). Afghanistan Advancing Peace, Inclusion and Prosperity. Diambil 27 September 2021, dari wilpf.org website: <https://www.wilpf.org/afghanistan-advancing-peace-inclusion-and-prosperity/>
- WILPF. (2021). Our Herstory – WILPF. Diambil 26 September 2021, dari wilpf.org website: <https://www.wilpf.org/our-herstory/>
- WILPF Afghanistan Section. (2019). Annual Reports – WILPF. Diambil 27 September 2021, dari WILPF Afghanistan website: <https://www.wilpf.org.af/annual-reports/>
- WILPF Afghanistan Section. (2021, Maret). Narrative Report – WILPF. Diambil 27 September 2021, dari Narrative Report website: <https://www.wilpf.org.af/narrative-report/>